ANALISIS MANIPULASI GEOLOKASI E-KINERJA SEBAGAI PERSOALAN INTEGRITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PIDIE JAYA

Faiz Abrar
NPP. 33.0012
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email: faiz.abrar2004@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ikhbaluddin, S.Kom., M.Si
Email: ikhbaluddin@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Research Gap: *Geolocation manipulation in the E-Kinerja application is a significant issue in digital-based ASN performance assessment. This problem does not only concern the technical aspects of the system, but also relates to ASN performance integrity, particularly the validity of attendance data, discipline, honesty, and responsibility in using digital government systems. Previous studies have mostly discussed financial fraud, digital attendance systems, e-government development, and information technology governance. However, studies that specifically examine geolocation manipulation in the E-Kinerja application in relation to ASN performance integrity remain limited.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze geolocation manipulation practices in the E-Kinerja application in relation to ASN performance integrity at the Regional Civil Service and Human Resources Development Agency of Pidie Jaya Regency.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation study. The data were analyzed using the Fraud Triangle Theory, which consists of three dimensions: Pressure, Opportunity, and* Rationalization. ***Result:*** *The findings show that geolocation manipulation in the E-Kinerja application is influenced by financial pressure related to the Employee Performance Allowance, time and distance pressure, application security loopholes, weak supervision after attendance recording, sanctions that have not fully created a deterrent effect, justification of system weaknesses, and a permissive work culture. Meanwhile, job dissatisfaction and compensation-based justification were not dominant factors.* ***Conclusion:*** *This study concludes that geolocation manipulation in the E-Kinerja application is not merely a technical issue, but is also related to ASN performance integrity. This practice weakens the validity of attendance data, reduces the objectivity of performance assessment, and reflects problems of honesty, discipline, and responsibility in using the E-Kinerja system.*

Keywords: *ASN performance integrity; E-Kinerja;* Fraud Triangle Theory*; geolocation manipulation; SPBE.*

ABSTRAK

Permasalahan/Kesenjangan Penelitian: Praktik manipulasi geolokasi pada aplikasi E-Kinerja merupakan permasalahan penting dalam penyelenggaraan penilaian kinerja ASN berbasis digital. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis sistem, tetapi juga berhubungan dengan integritas kinerja ASN, khususnya keabsahan data kehadiran, kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menggunakan sistem pemerintahan digital. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas kecurangan keuangan, sistem presensi digital, perkembangan *e-government*, dan tata kelola teknologi informasi. Namun, kajian yang secara khusus membahas manipulasi geolokasi pada aplikasi E-Kinerja dalam kaitannya dengan integritas kinerja ASN masih terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik manipulasi geolokasi pada aplikasi E-Kinerja dalam kaitannya dengan integritas kinerja ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan *Fraud Triangle Theory* yang terdiri atas dimensi *Pressure*, *Opportunity*, dan *Rationalization*. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manipulasi geolokasi pada aplikasi E-Kinerja dipengaruhi oleh tekanan finansial terkait Tambahan Penghasilan Pegawai, tekanan waktu dan jarak, celah keamanan aplikasi, lemahnya pengawasan setelah presensi, sanksi yang belum sepenuhnya memberikan efek jera, pembenaran terhadap kelemahan sistem, dan budaya permisif di lingkungan kerja. Sementara itu, ketidakpuasan terhadap pekerjaan dan pembenaran kompensasi tidak menjadi faktor dominan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa manipulasi geolokasi pada aplikasi E-Kinerja tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan integritas kinerja ASN. Praktik tersebut melemahkan keabsahan data kehadiran, mengurangi objektivitas penilaian kinerja, serta menunjukkan persoalan kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab ASN dalam penggunaan E-Kinerja.

Kata kunci: E-Kinerja; *Fraud Triangle Theory*; integritas kinerja ASN; manipulasi geolokasi; SPBE.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan digital, sistem elektronik tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun proses kerja pemerintahan yang terintegrasi dan berbasis data. Layne dan Lee menjelaskan bahwa perkembangan *e-government* bergerak melalui tahapan katalogisasi, transaksi, integrasi vertikal, hingga integrasi horizontal, yang menunjukkan bahwa sistem digital pemerintahan idealnya tidak berhenti pada penyediaan aplikasi, tetapi juga harus mendukung proses kerja yang lebih terhubung dan andal(Layne & Lee, 2001). Sejalan dengan itu, Janowski menegaskan bahwa pemerintahan digital berkembang menuju bentuk yang semakin kompleks dan kontekstual, sehingga keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh organisasi, kebijakan, dan perilaku pengguna(Janowski, 2015).

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, aplikasi E-Kinerja digunakan sebagai instrumen pencatatan kehadiran, pelaporan aktivitas kerja, dan penilaian kinerja ASN. Sistem ini diharapkan mampu memperkuat kedisiplinan pegawai serta meningkatkan objektivitas penilaian

kinerja. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan praktik manipulasi geolokasi yang memungkinkan ASN tercatat hadir dalam sistem meskipun keberadaan faktualnya tidak sepenuhnya sesuai dengan lokasi kerja. Permasalahan ini tidak dapat dipahami hanya sebagai kelemahan teknis aplikasi, tetapi juga berkaitan dengan integritas aparatur dalam menggunakan sistem digital. Hal ini sejalan dengan pandangan Ikhbaluddin bahwa penerapan teknologi informasi pemerintahan memerlukan strategi, kesiapan regulasi, integrasi sistem, dan kapasitas sumber daya manusia agar benar-benar mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan(Ikhbaluddin, 2020).

Oleh karena itu, praktik manipulasi geolokasi pada aplikasi E-Kinerja perlu dianalisis sebagai persoalan integritas kinerja ASN. Data kehadiran yang tidak sepenuhnya valid dapat melemahkan objektivitas penilaian kinerja, mengganggu keadilan dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem digital pemerintahan. Dalam konteks layanan digital pemerintahan, Janssen, Rana, Slade, dan Dwivedi menegaskan bahwa *trustworthiness* atau keterpercayaan menjadi konsep penting karena berkaitan dengan keandalan, integritas, keamanan, dan kepercayaan terhadap layanan digital pemerintah. Dengan demikian, manipulasi geolokasi tidak hanya menjadi masalah aplikasi, tetapi juga masalah kejujuran data, kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas kinerja ASN(Janssen et al., 2017).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Kesenjangan masalah dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas manipulasi geolokasi pada aplikasi E-Kinerja sebagai persoalan integritas kinerja ASN. Penelitian terdahulu umumnya membahas kecurangan dalam konteks keuangan, efektivitas sistem presensi digital, pengembangan aplikasi presensi, atau tata kelola teknologi informasi pemerintahan. Hashim menunjukkan bahwa kecurangan dapat terjadi karena adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi, bahkan ketika prosedur dan aturan organisasi telah tersedia(Hashim & Salleh, 2020). Namun, penelitian tersebut berfokus pada kecurangan keuangan, bukan pada kecurangan digital dalam sistem presensi ASN. Di sisi lain, penelitian Wahyudi, Murdiyana, dan Ikhbaluddin membahas tata kelola teknologi informasi berbasis kinerja organisasi dan menemukan bahwa pengelolaan TI perlu ditingkatkan agar selaras dengan tujuan organisasi(Wahyudi, Murdiyana, & Ikhbaluddin, 2024). Akan tetapi, penelitian tersebut belum secara khusus membahas manipulasi geolokasi sebagai bentuk penyimpangan dalam sistem E-Kinerja.

Kesenjangan lainnya adalah penggunaan *Fraud Triangle Theory* dalam penelitian ini diarahkan untuk membaca kecurangan digital berbasis geolokasi, bukan kecurangan keuangan atau pajak. Dari penelitian terdahulu dalam skripsi, Nugraha dan Susanto relevan karena menggunakan *Fraud Triangle Theory* untuk menjelaskan perilaku kecurangan di Indonesia(Nugrahaa & Susanto, 2018), sedangkan Nugraha dan Putri relevan karena membahas aplikasi presensi berbasis *Lock GPS* dan fitur anti-*Fake Location*(Nugraha, Putri, & Gps, 2024). Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah antara kajian *fraud*, tata kelola teknologi informasi pemerintahan, dan integritas kinerja ASN dalam penggunaan E-Kinerja.

.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena praktik manipulasi geolokasi dapat melemahkan validitas data kehadiran ASN dan berdampak pada objektivitas penilaian kinerja. Apabila data presensi yang tercatat dalam E-Kinerja tidak mencerminkan kondisi kerja yang sebenarnya, maka sistem penilaian kinerja berisiko menghasilkan keputusan yang kurang adil, terutama ketika data tersebut berkaitan dengan

disiplin pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai. Urgensi ini semakin kuat karena penerapan sistem digital pemerintahan tidak cukup hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi, tetapi juga pada tata kelola, keamanan sistem, integritas data, dan kepatuhan pengguna. Wahyudi, Murdiyana, dan Ikhbaluddin menekankan bahwa tata kelola teknologi informasi perlu diperkuat agar proses yang berjalan dapat selaras dengan tujuan organisasi pemerintahan(Wahyudi et al., 2024).

Selain itu, penelitian ini penting bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya karena instansi tersebut memiliki fungsi strategis dalam pembinaan dan pengawasan manajemen kepegawaian. Jika praktik manipulasi geolokasi tidak dianalisis secara mendalam, maka pemerintah daerah dapat kehilangan dasar empiris untuk memahami akar penyebab penyimpangan, baik dari sisi tekanan pegawai, celah sistem, lemahnya pengawasan, maupun pembenaran terhadap pelanggaran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat keamanan E-Kinerja, meningkatkan pengawasan atasan langsung, menegakkan sanksi secara konsisten, serta membina integritas digital ASN.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kecurangan, pemerintahan digital, keterpercayaan layanan digital, tata kelola teknologi informasi, dan sistem presensi berbasis geolokasi. Penelitian pertama adalah Hashim, Salleh, Shuhaimi, dan Ismail yang berjudul *The Risk of Financial Fraud: A Management Perspective*. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus eksploratif kualitatif pada empat perusahaan yang dikendalikan negara dengan menggunakan *Fraud Triangle Theory*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kecurangan tetap tinggi meskipun prosedur dan aturan telah tersedia, dan penyebabnya tidak hanya berkaitan dengan peluang, tetapi juga insentif/tekanan dan rasionalisasi. Penelitian ini relevan karena menjadi dasar penggunaan *Fraud Triangle Theory* dalam menganalisis penyebab praktik manipulasi geolokasi pada aplikasi E-Kinerja(Hashim & Salleh, 2020).

Penelitian kedua adalah Nugraha dan Susanto yang berjudul *The Fraud Behavior from the Perspectives of the Fraud Triangle: An Indonesian Case*. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian terdahulu dari skripsi yang tetap perlu dipakai karena mengonfirmasi relevansi *Fraud Triangle Theory* dalam membaca perilaku kecurangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecurangan terjadi karena adanya *Pressure*, *Opportunity*, dan *Rationalization*, serta menempatkan *Opportunity* sebagai celah atau *loop hole* dalam sistem pengendalian internal(Nugrahaa & Susanto, 2018). Penelitian ini relevan karena manipulasi geolokasi pada E-Kinerja juga terjadi ketika terdapat celah sistem dan lemahnya kontrol pengawasan.

Penelitian ketiga adalah Layne dan Lee yang berjudul *Developing Fully Functional E-Government: A Four Stage Model*. Penelitian ini menjelaskan model perkembangan *e-government* melalui empat tahap, yaitu *cataloguing*, *transaction*, *vertical integration*, dan *horizontal integration*. Model tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan digital idealnya berkembang dari sekadar penyediaan informasi menuju integrasi sistem dan proses kerja pemerintahan(Layne & Lee, 2001). Penelitian ini relevan karena aplikasi E-Kinerja merupakan bagian dari sistem digital pemerintahan yang tidak hanya harus berfungsi sebagai alat presensi, tetapi juga harus menjamin keandalan data dan integrasi proses penilaian kinerja ASN.

Penelitian keempat adalah Janowski yang berjudul *Digital Government Evolution: From Transformation to Contextualization*. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintahan digital

berkembang menuju bentuk yang semakin kompleks dan kontekstual, dari tahap digitalisasi, transformasi, keterlibatan, hingga kontekstualisasi(Janowski, 2015). Penelitian ini relevan karena praktik manipulasi geolokasi menunjukkan bahwa persoalan pemerintahan digital tidak hanya berada pada aspek aplikasi, tetapi juga pada konteks pengguna, organisasi, budaya kerja, dan integritas data.

Penelitian kelima adalah Janssen, Rana, Slade, dan Dwivedi yang berjudul *Trustworthiness of Digital Government Services: Deriving a Comprehensive Theory through Interpretive Structural Modelling*. Penelitian ini menekankan bahwa keterpercayaan layanan digital pemerintah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk keandalan, integritas, keamanan, dan persepsi pengguna terhadap layanan digital(Janssen et al., 2017). Penelitian ini relevan karena manipulasi geolokasi pada E-Kinerja dapat melemahkan keterpercayaan terhadap data kehadiran dan objektivitas sistem penilaian kinerja ASN.

Penelitian keenam adalah Ikhbaluddin yang berjudul *Strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Menerapkan Teknologi Informasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menemukan bahwa penerapan teknologi informasi pemerintahan masih menghadapi kendala berupa belum adanya regulasi yang komprehensif, aplikasi yang masih parsial, belum terintegrasi, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia(Ikhbaluddin, 2020). Penelitian ini relevan karena E-Kinerja sebagai sistem digital kepegawaian juga membutuhkan kesiapan regulasi, integrasi sistem, kompetensi pengguna, dan strategi pengelolaan agar dapat memperkuat tata kelola pemerintahan.

Penelitian ketujuh adalah Ikhbaluddin dan Kawuryan yang berjudul *Information Technology Development (Website) in Supporting Government Communication in Depok City, West Java Province*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan bahwa website Pemerintah Kota Depok telah digunakan untuk komunikasi dan pelayanan publik, tetapi masih perlu perbaikan dalam pembaruan informasi, respons terhadap pengaduan masyarakat, kewenangan pengumpulan informasi, dan pemeliharaan sistem(Kawuryan, 2022). Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa sistem teknologi informasi pemerintahan harus dikelola secara berkelanjutan agar informasi yang dihasilkan tetap akurat, responsif, dan dapat dipercaya.

Penelitian kedelapan adalah Wahyudi, Murdiyana, dan Ikhbaluddin yang berjudul *Penilaian Tata Kelola Teknologi Informasi Berbasis Kinerja Organisasi Menggunakan COBIT 2019 dan Balanced Scorecard*. Penelitian ini menggunakan *mixed method* dengan desain eksploratori sekuensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola teknologi informasi perlu ditingkatkan agar seluruh proses dapat berfungsi penuh, selaras dengan tujuan organisasi, dan mendukung pencapaian tujuan strategis(Wahyudi et al., 2024). Penelitian ini relevan dengan penelitian ini karena E-Kinerja sebagai sistem digital ASN membutuhkan tata kelola TI yang baik, terutama dalam menjaga keamanan aplikasi, validitas data, dan objektivitas penilaian kinerja.

Penelitian kesembilan adalah Nugraha dan Putri yang berjudul *Aplikasi Presensi Karyawan M-Presence Menggunakan Metode Lock GPS Berbasis Android*. Penelitian ini merupakan penelitian terdahulu dari skripsi yang tetap penting dipakai karena membahas sistem presensi berbasis *Lock GPS* dan fitur anti-*Fake Location*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi presensi berbasis Android yang dilengkapi *Lock GPS* dan anti-*Fake Location* dapat mencegah kecurangan lokasi, mempermudah proses presensi, dan membantu rekapitulasi data kehadiran(Nugraha et al., 2024). Penelitian ini relevan

karena memberi pembanding teknis terhadap temuan penelitian ini mengenai celah keamanan aplikasi E-Kinerja dan perlunya penguatan fitur pencegahan manipulasi geolokasi.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan karena menempatkan praktik manipulasi geolokasi pada aplikasi E-Kinerja sebagai persoalan integritas kinerja ASN, bukan sekadar persoalan teknis aplikasi. Berbeda dengan Hashim et al. yang membahas kecurangan keuangan dengan *Fraud Triangle Theory*, penelitian ini menggunakan teori yang sama untuk menjelaskan kecurangan digital dalam sistem presensi dan penilaian kinerja ASN(Hashim & Salleh, 2020). Berbeda pula dengan Layne dan Lee yang membahas perkembangan pemerintahan digital secara umum, penelitian ini mengkaji persoalan spesifik dalam penerapan sistem digital kepegawaian, yaitu manipulasi geolokasi pada E-Kinerja.(Layne & Lee, 2001)

Kebaruan lainnya terletak pada penggabungan perspektif *fraud*, tata kelola teknologi informasi pemerintahan, dan integritas kinerja ASN. Penelitian Wahyudi, Murdiyana, dan Ikhbaluddin membahas tata kelola TI berbasis kinerja organisasi, sedangkan penelitian ini secara lebih spesifik menyoroti bagaimana celah sistem, pengawasan, sanksi, dan budaya permisif dapat membuka ruang manipulasi data kehadiran dalam E-Kinerja(Wahyudi et al., 2024). Selain itu, lokus penelitian ini berada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya, yaitu instansi yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan manajemen kepegawaian, sehingga praktik manipulasi geolokasi di lingkungan tersebut memiliki bobot integritas yang lebih serius.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik manipulasi geolokasi pada aplikasi E-Kinerja dalam kaitannya dengan integritas kinerja ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan perilaku, pengalaman, alasan, dan pemaknaan informan terhadap praktik manipulasi geolokasi pada aplikasi E-Kinerja. Melalui pendekatan ini, penulis dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai tekanan yang dialami ASN, peluang yang tersedia dalam sistem, serta pembenaran yang digunakan untuk memaklumi tindakan manipulasi geolokasi. Pemilihan metode ini juga sejalan dengan penelitian Ikhbaluddin yang menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis kondisi faktual penerapan teknologi informasi pemerintahan berdasarkan persepsi informan, data sekunder, dan observasi(Ikhbaluddin, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap penggunaan, pengawasan, dan pengelolaan aplikasi E-Kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya. Observasi dilakukan untuk memahami praktik penggunaan aplikasi dan pola pengawasan di lingkungan kerja, sedangkan studi dokumentasi digunakan

untuk menelaah regulasi, data, dan dokumen yang berkaitan dengan E-Kinerja, presensi, disiplin ASN, dan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis menggunakan *Fraud Triangle Theory* yang meliputi dimensi *Pressure*, *Opportunity*, dan *Rationalization*. Dimensi *Pressure* digunakan untuk membaca tekanan yang mendorong ASN melakukan manipulasi, dimensi *Opportunity* digunakan untuk membaca celah yang memungkinkan manipulasi terjadi, sedangkan dimensi *Rationalization* digunakan untuk membaca pembenaran yang membuat tindakan manipulasi dianggap dapat dimaklumi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dimensi *Pressure*

Pada dimensi *Pressure*, penelitian menemukan bahwa praktik manipulasi geolokasi pada aplikasi E-Kinerja terjadi karena adanya tekanan finansial dan tekanan waktu serta jarak. Tekanan finansial muncul karena data kehadiran dalam E-Kinerja berkaitan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai. Kondisi ini membuat presensi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga berhubungan dengan hak keuangan pegawai. Ketika pegawai merasa kehadirannya terancam tidak tercatat sesuai ketentuan, muncul dorongan untuk menjaga status hadir dalam sistem.

Tekanan waktu dan jarak juga menjadi faktor yang memengaruhi. Tuntutan hadir tepat waktu diberlakukan kepada seluruh ASN, sedangkan kondisi jarak tempat tinggal, perjalanan, dan hambatan mobilitas pegawai tidak selalu sama. Bagi pegawai yang menghadapi jarak tempuh jauh atau kendala perjalanan, kewajiban presensi tepat waktu dapat menjadi tekanan tambahan. Temuan ini sejalan dengan Hashim yang menjelaskan bahwa tekanan merupakan salah satu unsur penting yang dapat mendorong terjadinya kecurangan(Hashim & Salleh, 2020). Namun, dalam penelitian ini ketidakpuasan terhadap pekerjaan tidak menjadi faktor dominan karena hubungan antara beban kerja dan penghargaan yang diterima masih dinilai relatif seimbang.

3.2. Dimensi *Opportunity*

Pada dimensi *Opportunity*, penelitian menemukan bahwa praktik manipulasi geolokasi terjadi karena adanya celah keamanan aplikasi, lemahnya kontrol pengawasan, dan sanksi yang belum sepenuhnya memberikan efek jera. Celah keamanan aplikasi terlihat dari masih adanya kemungkinan penggunaan lokasi palsu atau aplikasi pihak ketiga untuk memanipulasi koordinat kehadiran. Ketika sistem belum mampu memastikan keaslian data lokasi secara kuat, ASN memiliki peluang untuk tercatat hadir secara administratif meskipun keberadaan faktualnya tidak sepenuhnya sesuai dengan lokasi kerja.

Selain itu, pengawasan setelah presensi masih bergantung pada atasan langsung. Aplikasi E-Kinerja dapat mencatat waktu dan lokasi kehadiran, tetapi belum sepenuhnya memastikan keberadaan dan aktivitas pegawai selama jam kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan digital tetap memerlukan kontrol manusia dan tata kelola organisasi yang kuat. Temuan ini sejalan dengan Nugraha dan Susanto yang menegaskan bahwa *Opportunity* muncul dari celah atau *loop hole* dalam pengendalian

internal(Nugrahaa & Susanto, 2018). Temuan ini juga diperkuat oleh Wahyudi, Murdiyana, dan Ikhbaluddin yang menekankan perlunya peningkatan tata kelola dan manajemen teknologi informasi agar proses digital dapat berfungsi penuh dan selaras dengan tujuan organisasi(Wahyudi et al., 2024).

Kelemahan pada dimensi peluang juga menunjukkan pentingnya penguatan fitur teknis aplikasi. Penelitian Nugraha dan Putri menunjukkan bahwa sistem presensi yang dilengkapi metode *Lock GPS* dan anti-*Fake Location* dapat membantu mencegah kecurangan lokasi(Nugrahaa & Susanto, 2018). Oleh karena itu, praktik manipulasi geolokasi pada E-Kinerja perlu dijawab melalui penguatan keamanan aplikasi, peningkatan validasi lokasi, serta pengawasan lanjutan setelah presensi.

3.3. Dimensi *Rationalization*

Pada dimensi *Rationalization*, penelitian menemukan bahwa praktik manipulasi geolokasi diperkuat oleh pembenaran terhadap kelemahan sistem dan budaya permisif di lingkungan kerja. Pembenaran terhadap kelemahan sistem muncul ketika pelanggaran dianggap terjadi karena aplikasi masih memiliki celah teknis. Dalam kondisi ini, tindakan manipulasi dapat dipersepsikan bukan sebagai kesalahan pribadi pengguna, melainkan sebagai akibat dari kelemahan sistem. Pembenaran semacam ini berbahaya karena dapat melemahkan kesadaran etis ASN dalam menggunakan sistem digital.

Budaya permisif juga memperkuat rasionalisasi. Ketika pelanggaran tidak selalu dipandang sebagai persoalan serius, maka manipulasi geolokasi dapat dianggap sebagai tindakan yang masih dapat dimaklumi. Hal ini berkaitan langsung dengan integritas kinerja ASN karena standar kejujuran data kehadiran menjadi lebih mudah dinegosiasikan. Hashim menjelaskan bahwa rasionalisasi merupakan pembenaran terhadap tindakan tidak etis, dan seseorang cenderung lebih mudah melakukan kecurangan ketika mampu membenarkan tindakan tersebut secara moral(Hashim & Salleh, 2020). Dalam penelitian ini, pembenaran kompensasi tidak menjadi faktor dominan karena tidak ditemukan pembenaran kuat bahwa manipulasi dilakukan sebagai bentuk balasan atas beban kerja atau ketidakadilan kompensasi.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik manipulasi geolokasi pada aplikasi E-Kinerja tidak terjadi karena satu faktor tunggal, tetapi karena adanya hubungan antara tekanan, peluang, dan pembenaran. Temuan ini memperkuat penelitian Hashim yang menjelaskan bahwa kecurangan dapat terjadi karena adanya kombinasi antara *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*, bahkan ketika organisasi telah memiliki prosedur dan aturan formal. Perbedaannya, Hashim membahas kecurangan keuangan pada perusahaan yang dikendalikan negara, sedangkan penelitian ini membahas kecurangan digital dalam sistem presensi dan penilaian kinerja ASN(Hashim & Salleh, 2020). Dengan demikian, penelitian ini memperluas penggunaan *Fraud Triangle Theory* dari konteks kecurangan keuangan menuju konteks manipulasi geolokasi dalam pemerintahan daerah.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Nugraha dan Susanto yang menegaskan bahwa perilaku kecurangan dapat dijelaskan melalui tiga unsur utama, yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Persamaannya terletak pada pemahaman bahwa peluang atau celah dalam sistem dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penyimpangan. Namun, perbedaannya terletak pada objek kecurangan yang dikaji. Nugraha dan Susanto membahas kecurangan dalam konteks pajak, sedangkan penelitian ini membahas manipulasi geolokasi sebagai bentuk kecurangan kehadiran atau *time fraud* dalam sistem E-Kinerja. Dalam penelitian ini, celah yang dimaksud bukan celah hukum atau administratif, melainkan celah teknis aplikasi, lemahnya pengawasan setelah presensi, dan belum kuatnya efek sanksi(Nugrahaa & Susanto, 2018).

Jika dikaitkan dengan penelitian Layne dan Lee, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-Kinerja sebagai bagian dari *e-government* tidak cukup hanya dipahami sebagai penggunaan aplikasi digital. Layne dan Lee menjelaskan bahwa perkembangan *e-government* bergerak dari tahap penyediaan informasi menuju transaksi dan integrasi sistem. Dalam konteks penelitian ini, E-Kinerja seharusnya tidak hanya menjadi alat pencatatan presensi, tetapi juga harus mampu menjamin validitas data, integrasi pengawasan, dan keandalan proses penilaian kinerja ASN(Layne & Lee, 2001). Oleh karena itu, praktik manipulasi geolokasi menunjukkan bahwa penerapan sistem digital kepegawaian masih memerlukan penguatan pada aspek keamanan, kontrol, dan integrasi pengawasan.

Temuan ini juga relevan dengan Janowski yang menjelaskan bahwa pemerintahan digital berkembang dari sekadar digitalisasi menuju transformasi, keterlibatan, dan kontekstualisasi. Dalam konteks penelitian ini, manipulasi geolokasi menunjukkan bahwa persoalan pemerintahan digital tidak hanya terletak pada keberadaan aplikasi, tetapi juga pada konteks pengguna, budaya kerja, tata kelola organisasi, dan integritas data(Janowski, 2015). Artinya, aplikasi E-Kinerja tidak dapat dinilai berhasil hanya karena telah digunakan secara administratif, tetapi harus dilihat dari sejauh mana sistem tersebut mampu menghasilkan data kehadiran dan kinerja yang valid, akuntabel, dan dapat dipercaya.

Selanjutnya, temuan penelitian ini sejalan dengan Janssen yang menekankan pentingnya *trustworthiness* atau keterpercayaan dalam layanan digital pemerintah. Dalam penelitian ini, praktik manipulasi geolokasi berpotensi menurunkan keterpercayaan terhadap E-Kinerja karena data yang tercatat dalam sistem tidak selalu mencerminkan kondisi kerja yang sebenarnya. Ketika data kehadiran dapat dimanipulasi, maka sistem digital tidak lagi sepenuhnya menjadi dasar yang kuat bagi penilaian disiplin dan kinerja ASN(Janssen et al., 2017). Oleh karena itu, manipulasi geolokasi tidak hanya menjadi masalah teknis, tetapi juga menjadi masalah integritas data dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan digital.

Temuan penelitian ini juga berkaitan dengan penelitian Ikhbaluddin yang menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi pemerintahan memerlukan strategi, regulasi, integrasi sistem, kompetensi sumber daya manusia, dan keterlibatan berbagai pihak. Dalam konteks E-Kinerja, kelemahan pada aspek pengawasan, keamanan aplikasi, dan pembinaan pengguna menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi pemerintahan belum dapat dilepaskan dari kebutuhan tata kelola yang kuat(Ikhbaluddin, 2020). Dengan demikian, penguatan E-Kinerja tidak cukup dilakukan melalui penyediaan aplikasi, tetapi juga harus mencakup kesiapan regulasi, kapasitas aparatur, pengawasan berjenjang, dan pembentukan budaya kerja yang berintegritas.

Temuan ini diperkuat pula oleh penelitian Ikhbaluddin dan Kawuryan yang menunjukkan bahwa pengembangan teknologi informasi pemerintahan membutuhkan pemeliharaan sistem, pembaruan informasi, kejelasan kewenangan, dan respons yang cepat terhadap permasalahan yang muncul. Dalam konteks penelitian ini, E-Kinerja sebagai sistem digital kepegawaian juga membutuhkan pemeliharaan dan pengawasan yang berkelanjutan agar data kehadiran yang dihasilkan tetap akurat dan dapat dipercaya(Kawuryan, 2022). Oleh karena itu, manipulasi geolokasi menunjukkan bahwa sistem digital pemerintahan tidak cukup hanya tersedia, tetapi harus terus dijaga kualitas, keamanan, dan akuntabilitas penggunaannya.

Selain itu, penelitian Wahyudi, Murdiyana, dan Ikhbaluddin (2024) menekankan pentingnya tata kelola teknologi informasi berbasis kinerja organisasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola TI perlu ditingkatkan agar sistem digital dapat berfungsi secara optimal dan selaras dengan tujuan

organisasi. Dalam penelitian ini, manipulasi geolokasi membuktikan bahwa sistem E-Kinerja membutuhkan tata kelola yang lebih kuat, terutama dalam menjaga keamanan aplikasi, validitas data kehadiran, pengawasan setelah presensi, serta konsistensi penegakan sanksi(Wahyudi et al., 2024). Dengan demikian, keberhasilan E-Kinerja bukan hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh integritas pengguna, keandalan sistem, dan tata kelola organisasi yang mendukung objektivitas penilaian kinerja ASN.

Secara keseluruhan, diskusi temuan utama menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dari penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kecurangan keuangan, kecurangan pajak, perkembangan *e-government*, keterpercayaan layanan digital, dan tata kelola teknologi informasi secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis manipulasi geolokasi pada aplikasi E-Kinerja sebagai persoalan integritas kinerja ASN. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan perspektif *Fraud Triangle Theory*, tata kelola pemerintahan digital, dan integritas kinerja ASN dalam menjelaskan penyebab terjadinya manipulasi geolokasi pada sistem penilaian kinerja aparatur.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah bahwa praktik manipulasi geolokasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya memiliki bobot integritas yang lebih serius. Hal ini karena instansi tersebut memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan manajemen kepegawaian. Jika dikaitkan dengan Cressey, tindakan menyimpang dapat muncul ketika pelaku menghadapi tekanan, melihat peluang, dan memiliki pembenaran terhadap tindakannya. Dalam konteks penelitian ini, manipulasi geolokasi menjadi lebih serius karena terjadi pada sistem yang seharusnya mendukung kejujuran data kehadiran dan objektivitas penilaian kinerja ASN (Cressey, 1953).

Temuan lain menunjukkan bahwa solusi terhadap manipulasi geolokasi tidak dapat hanya bergantung pada perbaikan teknis aplikasi. Wolfe dan Hermanson melalui konsep *Fraud Diamond* menambahkan unsur *capability* atau kemampuan pelaku dalam memanfaatkan peluang kecurangan(Wolfe & Hermanson, 2004). Dalam konteks E-Kinerja, celah aplikasi baru menjadi masalah serius ketika pengguna memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi celah tersebut melalui aplikasi pihak ketiga atau fitur lokasi palsu. Oleh karena itu, penguatan sistem harus disertai dengan pengawasan, pembatasan akses penyalahgunaan fitur lokasi, dan peningkatan kesadaran etis pengguna.

Dari sisi sistem informasi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan E-Kinerja tidak cukup diukur dari apakah aplikasi digunakan atau tidak. DeLone dan McLean menjelaskan bahwa keberhasilan sistem informasi berkaitan dengan kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih(Delone & Mclean, 2014). Dalam penelitian ini, manipulasi geolokasi menunjukkan adanya persoalan pada kualitas informasi karena data kehadiran yang dihasilkan sistem tidak selalu mencerminkan kondisi faktual pegawai. Oleh karena itu, E-Kinerja perlu dievaluasi bukan hanya dari sisi ketersediaan aplikasi, tetapi juga dari sisi kualitas dan validitas data yang dihasilkan.

Temuan ini juga dapat dikaitkan dengan penerimaan teknologi oleh pengguna. Davis menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Dalam konteks E-Kinerja, kemudahan penggunaan memang dapat membantu ASN melakukan presensi secara cepat, tetapi kemudahan tersebut juga dapat membuka ruang penyimpangan apabila tidak diikuti dengan kontrol sistem dan pengawasan yang memadai(Davis, 2013). Dengan demikian, kemudahan aplikasi perlu diimbangi dengan mekanisme verifikasi agar penggunaan sistem tetap berjalan sesuai tujuan penilaian kinerja.

Selain itu, Venkatesh melalui *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung(Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2019). Dalam penelitian ini, penggunaan E-Kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh manfaat aplikasi, tetapi juga oleh kondisi pendukung seperti pengawasan, ketegasan sanksi, dan budaya kerja. Apabila kondisi pendukung tersebut lemah, maka sistem yang seharusnya meningkatkan disiplin justru dapat dimanfaatkan untuk manipulasi administratif.

Manipulasi geolokasi juga berkaitan dengan kepercayaan terhadap sistem digital pemerintahan. Alzahrani, Al-Karaghouli, dan Weerakkody menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan faktor penting dalam adopsi layanan *e-government*, serta dipengaruhi oleh aspek teknologi, lembaga pemerintah, risiko, dan karakteristik pengguna. Dalam konteks penelitian ini, apabila data kehadiran dalam E-Kinerja dapat dimanipulasi, maka kepercayaan terhadap sistem sebagai instrumen penilaian kinerja ASN dapat menurun(Alzahrani, Al-karaghouli, & Weerakkody, 2016). Dengan demikian, validitas data, keamanan sistem, dan keandalan informasi menjadi faktor penting agar E-Kinerja tetap dipercaya sebagai dasar penilaian disiplin dan kinerja ASN.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan E-Kinerja perlu dilihat dalam kerangka keberhasilan *e-government*. Ramo´n Gil-Garcı´a, Theresa, dan Pardo menjelaskan bahwa keberhasilan *e-government* tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada faktor organisasi, manajemen, kebijakan, dan koordinasi(Ramo & T, 2005). Dalam konteks penelitian ini, manipulasi geolokasi menunjukkan bahwa sistem presensi digital tidak akan berjalan efektif jika tidak disertai pengawasan, penegakan aturan, dan pembinaan integritas pengguna. Oleh karena itu, pencegahan manipulasi geolokasi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan teknologi, pengawasan organisasi, penegakan sanksi, dan pembinaan etika digital ASN.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa praktik manipulasi geolokasi pada aplikasi E-Kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya terjadi karena adanya hubungan antara tekanan, peluang, dan pembenaran. Pada dimensi *Pressure*, praktik manipulasi geolokasi dipengaruhi oleh tekanan finansial yang berkaitan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai serta tekanan waktu dan jarak dalam memenuhi kewajiban presensi tepat waktu. Tekanan tersebut mendorong sebagian ASN untuk menjaga status kehadiran dalam sistem, meskipun cara yang dilakukan tidak selalu sesuai dengan prinsip kejujuran dan kedisiplinan kerja.

Pada dimensi *Opportunity*, praktik manipulasi geolokasi terjadi karena masih adanya celah keamanan aplikasi, lemahnya pengawasan setelah presensi, serta sanksi yang belum sepenuhnya memberikan efek jera. Sistem E-Kinerja telah mencatat kehadiran ASN secara digital, tetapi belum sepenuhnya mampu memastikan bahwa data lokasi yang masuk benar-benar mencerminkan keberadaan

faktual pegawai di tempat kerja. Kondisi ini membuka peluang bagi ASN untuk tercatat hadir secara administratif meskipun keberadaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi kerja yang sebenarnya. Pada dimensi *Rationalization*, praktik manipulasi geolokasi diperkuat oleh pembenaran terhadap kelemahan sistem dan budaya permisif di lingkungan kerja. Manipulasi geolokasi dapat dianggap sebagai tindakan yang dapat dimaklumi karena adanya celah aplikasi atau karena pelanggaran tersebut tidak selalu dipandang sebagai persoalan serius. Padahal, pembenaran semacam ini dapat melemahkan kesadaran etis ASN dalam menggunakan sistem digital pemerintahan.

Dengan demikian, praktik manipulasi geolokasi pada aplikasi E-Kinerja menjadi persoalan integritas kinerja ASN karena melemahkan keabsahan data kehadiran, mengurangi objektivitas penilaian kinerja, dan menunjukkan adanya persoalan kejujuran, kedisiplinan, serta tanggung jawab ASN dalam menggunakan sistem digital. Permasalahan ini tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah teknis aplikasi, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola, pengawasan, dan integritas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokus yang hanya berfokus pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk seluruh perangkat daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga temuan lebih menekankan pemahaman mendalam terhadap penyebab dan makna praktik manipulasi geolokasi, bukan pengukuran hubungan antarvariabel secara statistik. Keterbatasan lainnya adalah penelitian ini tidak melakukan audit teknis secara langsung terhadap sistem keamanan aplikasi E-Kinerja. Oleh karena itu, analisis mengenai celah keamanan aplikasi didasarkan pada hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, bukan pada pengujian teknis aplikasi secara mendalam. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)**. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada perangkat daerah lain atau pemerintah daerah lain yang juga menggunakan sistem presensi digital berbasis geolokasi. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh tekanan, peluang, dan rasionalisasi terhadap kecenderungan manipulasi geolokasi. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan audit sistem atau analisis keamanan aplikasi untuk menguji secara teknis kerentanan sistem presensi berbasis geolokasi. Dengan demikian, kajian mengenai manipulasi geolokasi tidak hanya dapat dilihat dari sisi perilaku ASN, tetapi juga dari sisi keamanan teknologi, tata kelola sistem, dan efektivitas kebijakan pengawasan digital.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh informan yang telah memberikan data, informasi, dan penjelasan selama proses penelitian.

Penulis turut menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen penguji, keluarga, rekan-rekan, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alzahrani, L., Al-karaghouli, W., & Weerakkody, V. (2016). Analysing the critical factors in fl uencing

trust in e-government adoption from citizens ' perspective : A systematic review and a conceptual framework. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.06.004

Cressey, D. r. (1953). *Other People ' s Money Astudy A The Social Psychology Of Embezzleme*. L. C. Cat. Card No. 78-174667.

Davis, F. D. (2013). Information Technology Introduction, *13*(3), 319–340.

Delone, W. H., & Mclean, E. R. (2014). Journal of Management The DeLone and McLean Model of Information Systems Success : A Ten-Year Update, (March 2015), 37–41. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748

Hashim, H. A., & Salleh, Z. (2020). The risk of fi nancial fraud : a management perspective. https://doi.org/10.1108/JFC-04-2020-0062

Ikhbaluddin. (2020). Strategi pemerintah kota tasikmalaya dalam menerapkan teknologi informasi pemerintahan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, *2*(2), 41–57.

Janowski, T. (2015). Digital government evolution : From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, *32*(3), 221–236. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001

Janssen, M., Rana, N. P., Slade, E. L., Dwivedi, Y. K., Janssen, M., Rana, N. P., … Yogesh, K. (2017). Trustworthiness of digital government services : deriving a comprehensive theory through interpretive structural modelling. *Public Management Review*, *00*(00), 1–25. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1305689

Kawuryan, M. W. (2022). Information Technology Development (Website) in Supporting Government Communication in Depok City , West Java Province, *4*(1), 50–76.

Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, *18*(2), 122–136.

Nugraha, R. K., Putri, R. A., & Gps, L. (2024). Aplikasi Presensi Karyawan M-Presence Menggunakan Metode Lock Gps Berbasis Android, *4*(2), 675–687.

Nugrahaa, S., & Susanto, E. (2018). The Fraud Behavior from the Perspectives of the Fraud Triangle: an Indonesian Case Setya Nugraha. *Asian Association for Public Administration Annual Conference (AAPA 2018)*, *191*(Aapa), 113–120. https://doi.org/10.2991/aapa-18.2018.12

Ramo, J., & T, T. A. P. (2005). E-government success factors : Mapping practical tools to theoretical foundations, *22*, 187–216. https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.02.001

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2019). Quarterly, *27*(3), 425–478.

Wahyudi, R., Murdiyana, M., & Ikhbaluddin, I. (2024). Penilaian Tata Kelola Teknologi Informasi Berbasis Kinerja Organisasi Menggunakan Cobit 2019 dan Balanced Scorecard (Studi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kolaka Timur). *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*. https://doi.org/10.33701/jtkp.v6i2.4756

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud, *12*, 38–42.